

PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT —Strategi Antisipasi dan Penanganan Konflik dengan Kekerasan Antar Kelompok Masyarakat—

SURADI

Peneliti pada Balatbangsos, Departemen Sosial, Jakarta

ABSTRAK

Ketahanan sosial dan pembangunan merupakan dua konsep yang tali-temali. Di satu sisi, ketahanan sosial masyarakat menjadi pra kondisi terselenggaranya pembangunan, dan pada sisi yang lain pembangunan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan ketahanan sosial masyarakat. Dengan demikian ketahanan sosial masyarakat merupakan tujuan yang akan dicapai, sekaligus merupakan pra kondisi dalam penyelenggaraan pembangunan. Sebagai pra kondisi, maka diperlukan upaya pengembangan masyarakat yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sosial dasar, optimalisasi pelaksanaan peranan dan tugas-tugas kehidupan serta penyelesaian permasalahan dengan membangun jaringan kerja dan gerakan sosial dari berbagai kelompok masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan sosial yang menjadi perhatian serius Pemerintah dan Orsos/LSM, baik dalam maupun luar negeri pada tiga tahun terakhir ini adalah konflik antar kelompok masyarakat yang diwarnai dengan kekerasan. Fenomena konflik yang bernuansa SARA (*suku, agama, ras dan antar golongan*) tersebut, meski-pun terjadi di beberapa wilayah Indonesia, namun menimbulkan dampak yang luas. Bahkan menjadi isu nasional, karena sudah mengarah pada terjadinya disintegrasi bangsa. Bangsa Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi adat ketimurannya, seperti "guyub rukun," ramah, tenggang rasa, dan setia kawan; kini mengundang pertanyaan. Apakah keberingasan dan kekerasan itu yang sebenarnya karakter bangsa Indonesia?

Pada saat ini, di mana bangsa Indonesia memulai babak baru pemban-

gunan dengan mengedepankan demokratisasi yang memerlukan dukungan ketahanan sosial masyarakat, kondisi yang terjadi malah sebaliknya. Terjadi kehancuran keserasian sosial dan kesetiakawanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dampak langsung yang teramati adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin dan anak terlantar. Semua ini tentu makin menambah beban pemerintah, terkait dengan penyediaan pelayanan kebutuhan sosial dasar dan perlindungan bagi masyarakat untuk jangka waktu yang lama. Kondisi ini perlu disikapi dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak karena dapat membuka kesempatan yang lebar bagi pihak ketiga (termasuk pihak asing) untuk melakukan intervensi dan provokasi dalam upaya memperoleh keuntungan politik maupun ekonomi dalam situasi yang tidak menentu ini.

Di samping beban dalam penyediaan pelayanan sosial dasar dan

perlindungan, beban pemerintah untuk jangka waktu 10~15 tahun ke depan adalah masalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Seperti telah diekspose oleh berbagai media massa, ribuan anak-anak pengungsi dalam kondisi memprihatinkan. Mereka mengkonsumsi gizi buruk dan tidak sekolah lagi. Hal ini sangat mencemaskan, karena kondisi anak pada saat ini yang kekurangan gizi, tidak sekolah dan hidup dalam situasi sosial psikologis yang tidak sehat, akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang mereka secara optimal. Akibat jangka panjang adalah rendahnya kualitas SDM di masa depan yang berdampak pada kesinambungan pembangunan. Dari perspektif pekerjaan sosial, manusia yang disebut berkualitas itu memiliki ciri-ciri, yakni cerdas, kreatif, mandiri berbudi pekerti, dan memiliki jiwa setia kawan. Mereka yang memiliki ciri-ciri demikian itu lahir dan tumbuh dari lingkungan yang mampu memberikan kebutuhan fisik, psikis dan sosial secara optimal. Hanya SDM dengan ciri-ciri demikian yang mampu berkompetisi pada era globalisasi.

Berdasarkan data pada Departemen Sosial (2001), terdapat 1,279,979 jiwa pengungsi korban konflik dengan kekerasan antara kelompok masyarakat yang terjadi di Aceh, Maluku, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah serta beberapa daerah lainnya. Dalam upaya penanganan pengungsi ini, pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp234,016,541,220. Data pengungsi korban kerusuhan secara rinci terlihat pada tabel disamping.

Pada saat ini para korban kerusuhan di pengungsian, hidup dengan serba kekurangan dan secara kososial hidup dalam ketidakpastian.

Tabel 1 Pengungsi korban konflik antar kelompok masyarakat di 19 Propinsi

No.	Propinsi	Jumlah pengungsi
1	Aceh	18,095
2	Sumatera Utara	33,055
3	Riau	3,135
4	Jambi	2,103
5	Sumatera Selatan	1,700
6	Kalimantan Barat	68,934
7	Sulawesi Utara	39,934
8	Sulawesi Tengah	58,005
9	Sulawesi Selatan	35,804
10	Sulawesi Tenggara	161,226
11	Maluku	303,047
12	Maluku Utara	197,327
13	Irian Jaya	16,600
14	Nusa Tenggara Timur	151,159
15	Nusa Tenggara Barat	13,013
16	Bali	2,974
17	Jawa Timur	152,407
18	Jawa Tengah	12,335
19	Jawa Barat	9,275
	Jumlah	1,279,979

Sumber : Dit. Penanggulangan Bencana, Depsos, 2001

Mereka dihantui oleh perasaan cemas, takut dan harapan yang tidak kunjung datang. Dalam kondisi demikian, mereka dibayang-bayangi oleh kematian yang disebabkan oleh mewabahnya berbagai jenis penyakit. Ratusan anak-anak dan orang dewasa meninggal dunia di tempat pengungsian karena sakit. Apabila jumlah anak-anak pengungsi ini ditambahkan dengan anak yang mengalami keterlantaran dan rawan terlantar serta anak jalanan, diperkirakan sebanyak 15 juta anak Indonesia pada saat ini hidup dalam kondisi serba kekurangan untuk tumbuh kembang secara optimal. Dengan kondisi ini dikhawatirkan akan terjadi kehancuran pada kehidupan satu generasi (*lost generation*).

Konflik dengan kekerasan antar warga masyarakat yang bernuansa SARA merupakan wujud kemunduran peradaban dan budaya masyarakat

Indonesia. Karena cara-cara penyelesaian masalah dengan kekerasan, merupakan cara yang digunakan oleh masyarakat yang belum beradab (primitif), atau masyarakat yang belum mencapai kedewasaan. Masyarakat yang hidup dengan pola budaya demikian, tentu tidak akan dapat hidup dalam era kehidupan global dewasa ini, yang mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi dan *civil society*.

Dilihat dari perspektif pekerjaan sosial, suatu masyarakat bangsa yang majemuk, sangat rentan terhadap terjadinya konflik. Latar belakang budaya, sosial dan ekonomi yang berbeda merupakan kondisi yang melatarbelakangi terjadinya konflik antar kelompok masyarakat. Sedangkan dalam perspektif sosiologi, konflik merupakan kondisi normal dalam masyarakat. Konflik merupakan unsur potensi dalam masyarakat yang dapat menghasilkan perubahan sosial ke arah yang positif (*progress*). Dengan demikian, konflik merupakan sifat dasar suatu masyarakat yang menghendaki terjadinya perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Permasalahannya, bagaimana mengelola konflik tersebut untuk tujuan perubahan yang konstruktif, yang memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat sebagai satu bangsa. Sebagaimana tersurat dalam salah satu butir nilai filosofis dokumen PBB tentang "*Pekerjaan Sosial dan Hak Asasi Manusia*" dimana di dalamnya menawarkan penyelesaian konflik, apakah menggunakan kekerasan dan penghancuran atau secara damai (lihat UN Human Right and Social Work, 1994).

Mulia Astuti dan kawan-kawan (Puslitbang Kesos, 2000), dalam penelitiannya tentang "Pola Hubungan Antar

Kelompok Etnis," mengidentifikasi beberapa kondisi yang melatarbelakangi terjadinya konflik dengan kekerasan antar kelompok etnis di beberapa wilayah di Indonesia. Kondisi tersebut adalah masalah kesenjangan sosial, budaya dan ekonomi serta permasalahan agama. Ke empat akar masalah ini perlu menjadi perhatian oleh berbagai pihak (pemerintah maupun masyarakat) dan menjadi dasar dalam upaya penanganan konflik dengan kekerasan antar kelompok masyarakat. Sebab, apabila konflik dengan kekerasan ini tidak segera diselesaikan, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan yang berdampak luas bagi kelangsungan pembangunan nasional, antara lain:

1. Akan terjadi ancaman terhadap integrasi bangsa. Terjadinya konflik dengan kekerasan di Maluku, Pontianak, Poso, Sampit, Aceh dan beberapa wilayah lainnya merupakan suatu kenyataan yang sudah mengarah pada terjadinya disintegrasi bangsa;
2. Hilangnya dukungan badan-badan dunia, yang akan menyulitkan pemerintah, baik secara ekonomi maupun politik, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Penghentian bantuan dari Bank Dunia dalam program penanganan kemiskinan, penundaan pencairan dana IMF, merupakan sebuah kenyataan makin berkurangnya dukungan ekonomi maupun politik badan-badan dunia terhadap Indonesia.
3. Berkurangnya (atau bahkan hilangnya) dukungan dari sumber-sumber keuangan (investor) yang selama ini menggerakkan industri hulu. Para investor akan kesulitan untuk menjalankan usahanya

dalam waktu yang tidak terbatas. Karena itu, mereka akan mengalihkan modalnya ke negara lain, seperti Singapura, China dan Thailand. Dampak dari kondisi ini semakin bertambahnya jumlah pengangguran yang pada awal tahun 2002 sudah berjumlah 40 juta orang. Tidak dapat dipungkiri kondisi ini akan menimbulkan kehidupan makin carut-marut. Tindakan kriminal dan kekerasan akan terjadi dalam bentuk perampokan dan penjarahan hanya untuk sekadar dapat mempertahankan hidup.

Dari berbagai argumentasi tentang terjadinya konflik dengan kekerasan antar kelompok masyarakat, apabila dilakukan penelusuran secara mendalam, maka akar masalahnya terletak pada runtuhnya ketahanan sosial dalam kehidupan masyarakat sebagai satu bangsa. Runtuhnya ketahanan sosial masyarakat ini dapat dicermati dari beberapa fenomena:

1. Menurunnya kesanggupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kesenjangan sosial makin nyata, menyebabkan terhambatnya aksesibilitas kelas bawah untuk memperoleh pelayanan sosial dasar. Kondisi ini menyebabkan peranan dan tugas-tugas dalam kehidupan tidak dapat dilaksanakan, sehingga menimbulkan permasalahan sosial yang makin kompleks.
2. Masyarakat gampang sekali merespon isu yang berkembang, terutama berkenaan dengan masalah etnis dan agama, tanpa melakukan penelusuran kebenaran dari informasi yang diterima. Berkem-

bangnya prasangka sosial dan saling curiga antara kelompok masyarakat makin tidak dapat dihindari.

3. Menurunnya kemampuan masyarakat untuk mengendalikan diri dan cenderung agresif-impulsif, dalam melakukan tindakan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Tindakan kekerasan dan anarkis menjadi pilihan daripada upaya-upaya damai.
4. Nilai dan tradisi sebagai modal sosial makin renggang daya ikatnya dalam kehidupan kelompok masyarakat. Pranata sosial yang dulu dinilai efektif sebagai mekanisme pemecahan masalah di tingkat lokal, kini makin lemah perannya.

Kondisi ini perlu disikapi oleh berbagai pihak, terutama oleh pemerintah, melalui berbagai upaya koordinatif dengan mengedepankan peran serta masyarakat. Sebaik apapun konsep pengembangan masyarakat, apabila tidak mengedepankan peran serta masyarakat, maka akan dihadapkan pada berbagai kendala di lapangan.

2. KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL

Untuk memberikan kesamaan pemahaman maksud dan arah dari tulisan ini, perlu terlebih dahulu dipahami batasan tentang masyarakat. Menurut Murray G. Ross (Soetarso, 1991), masyarakat adalah keseluruhan orang yang tinggal di suatu daerah geografis misalnya desa, kota, propinsi, negara dan dunia. Dari pengertian ini, bahwa perbedaan khas yang terdapat pada orang-orang di dalam daerah

geografis tidak perlu dipersoalkan. Apakah mereka berasal dari etnis pribumi atau keturunan; apakah mereka menyandang kecacatan fisik, tuna sosial, tuna wisma dan perbedaan lainnya yang menggambarkan kemajemukan anggota dalam masyarakat.

Di dalam masyarakat yang terdiri dari orang-orang tersebut terdapat sejumlah ketentuan atau aturan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Dikemukakan oleh Budhisantoso (1994:33-47), bahwa masyarakat sebagai kesatuan sosial perlu mengembangkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam organisasi sosial antar anggotanya, yakni adanya pengaturan hubungan sosial antar anggotanya (*social alignment*), cita-cita atau tujuan bersama yang mengikat (*social media*), ketentuan sosial yang disepakati sebagai pedoman dalam relasi sosial (*social standard*) dan penegakan ketertiban hidup bersama (*social control*). Beberapa unsur tersebut mengendalikan anggota masyarakat untuk mengembangkan hubungan sosial yang konstruktif menuju kehidupan yang diwarnai kebersamaan dan setia kawan. Namun demikian, dalam kenyataan sehari-hari sejumlah unsur tersebut tidak dapat dipenuhi. Maka terjadi tiga bentuk hubungan antar kelompok masyarakat, yaitu (1) kerja sama (*colaborative*), (2) persaingan (*competitive*) dan (3) pertentangan (*conflictive*) (Abu Hanifah dkk, 2001).

Pola hubungan antara kelompok di dalam masyarakat, merupakan kondisi yang berpengaruh kuat terhadap integrasi suatu masyarakat sebagai satu bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan fisik dan keadaan saling berdekatan belum memberikan jaminan adanya sikap untuk saling menerima di antara

kelompok. Oleh karena itu perlu ditemukan kondisi yang mendukung terjadinya penerimaan timbal balik yang lebih kuat antar kelompok masyarakat, kerja sama yang lebih besar serta suasana sosial yang mendukung terjadinya kerjama sama (lihat Soetarso, 1991). Dengan demikian terjadinya penerimaan timbal balik yang lebih kuat antar kelompok, kerja sama dan suasana sosial yang mendukung kerja sama tersebut, merupakan unsur penting yang mengintegrasikan antar kelompok masyarakat sebagai satu bangsa.

Dalam kaitan ini, Einsadt (Soetarso, 1991), mengemukakan beberapa kondisi yang mendukung terjadinya integrasi masyarakat, yaitu:

- (1) *Pengembangan nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi kelompok yang serasi dengan nilai-nilai umum yang berlaku di dalam masyarakat.*

Suatu kelompok akan mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat kalau kelompok ini tidak mengembangkan nilai-nilai yang serasi dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Setiap kelompok dapat saja mengembangkan nilai-nilainya sendiri yang berbeda dari yang berlaku di dalam masyarakat, tetapi kalau perbedaan-perbedaan ini menyangkut isu-isu fundamental, maka situasi seperti ini akan mempersulit terjadinya integrasi.

- (2) *Perluasan ruang lingkup kegiatan-kegiatan kelompok sehingga mencakup juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam masyarakat.*

Pengembangan kegiatan kerjasama di dalam masyarakat akan menjadi lebih mudah kalau anggota-anggota suatu kelompok mulai berpar-

tisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ini. Tidak sedikit kelompok-kelompok yang melakukan kegiatan hanya menyangkut kepentingan kelompoknya saja. Kalau hal ini berlangsung terus, maka sulit dicapai integrasi masyarakat. Diantara kelompok dan masyarakat haruslah ada komunikasi dan partisipasi anggota kelompok dalam kegiatan kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk komunikasi.

(3) *Tingkat orientasi anggota kelompok-kelompok baru terhadap kelompok-kelompok lain yang sudah mapan di dalam masyarakat serta tingkat penerimaan kelompok yang sudah mapan terhadap anggota-anggota kelompok baru.*

Keinginan kelompok pendatang atau kelompok minoritas untuk menjadi anggota atau berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok yang sudah mapan atau mayoritas, merupakan situasi yang dapat mencegah disintegrasi dalam masyarakat.

(4) *Kesempatan yang diberikan oleh masyarakat luas terhadap kelompok-kelompok untuk memenuhi harapan-harapan serta aspirasi-aspirasinya berhubungan dengan peranan mereka.*

Adanya kemauan kelompok untuk bertanggung jawab, memberikan sumbangan, dan partisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat hendaknya diterima dan diusahakan penyalurannya secara tepat oleh kelompok-kelompok yang kuat yang selama ini mendominasi kelompok masyarakat. Hal ini merupakan kondisi yang dapat mempercepat proses integrasi.

(5) *Tingkat identifikasi dengan masyarakat yang lebih luas.*

Faktor ini sebenarnya sudah tercakup dalam uraian di atas. Identifikasi secara berlebih-lebihan dengan kelompok sendiri dapat menghambat integrasi, sedangkan identifikasi dengan kehidupan bersama dapat memperlancar identifikasi.

Berdasarkan pemikiran Einsadt, apabila kelima kondisi tersebut dapat dipenuhi, maka tidak akan terjadi konflik dengan kekerasan antar kelompok masyarakat atau terjadi kehidupan yang integratif. Antara kelompok masyarakat mengembangkan pola kerja sama kolaborasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan kondisi demikian, maka tercipta iklim yang kondusif untuk melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Berkembangnya pola hubungan yang memberikan kesempatan yang luas bagi setiap orang dari kelompok masyarakat manapun, untuk mengakses berbagai sumber yang tersedia, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial dasar.

Kondisi yang diliputi oleh rasa kebersamaan dan setia kawan ini akan mendorong anggota kelompok masyarakat untuk melaksanakan peranan dan tugas-tugas kehidupannya secara optimal. Keberadaan kelompok masyarakat dipahami sebagai potensi dan sumber bagi kelompok masyarakat yang lainnya untuk kelancaran pelaksanaan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Apabila sudah ada penerimaan satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain, maka terjadinya perbedaan menggambarkan sebuah dinamika suatu masyarakat yang menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik.

Dengan kondisi kemasyarakatan tersebut, maka permasalahan sosial yang ada di masyarakat akan dapat

ditangani secara optimal. Penanganan dimaksud, baik dalam bentuk pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi maupun pengembangan. Terbangunnya suatu jaringan kerja dalam masyarakat yang di dalamnya terdiri dari berbagai komponen, seperti tokoh adat, tokoh agama, pemimpin formal dan informal lokal yang tumbuh dari bawah. Mereka itu dalam melaksanakan kegiatannya dilandasi oleh rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Dari jaringan kerja ini akan terjadi gerakan sosial (*social movement*) yang terlembaga dalam mengatasi permasalahan sosial di tingkat lokal.

Dari pemikiran di atas, maka ketahanan sosial masyarakat dapat dipahami sebagai suatu kondisi kehidupan dinamis masyarakat yang ditandai oleh terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar, optimalnya pelaksanaan peranan dan tugas-tugas kehidupan pada setiap individu maupun kelompok, serta terselesaikannya masalah sosial melalui gerakan sosial yang dilandasi oleh nilai kebersamaan dan kesetiakawanan sosial.

3. INTERVENSI SOSIAL DALAM PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL

Pekerjaan sosial merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan terencana dengan memanfaatkan metode, strategi dan teknik-teknik tertentu, untuk membantu individu maupun kelompok masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mengoptimalkan potensi mereka. Dengan bantuan tersebut, individu maupun kelompok masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sosial dasarnya secara optimal dan dinamis, serta mampu menyelesaikan permasalahan

yang dihadapi di dalam kelompoknya maupun antara kelompok masyarakat. Kemampuan kelompok masyarakat ini dalam perspektif pekerjaan sosial tercakup dalam konsep keberfungsian sosial (*social functioning*).

Keberfungsian sosial kelompok masyarakat dapat dicapai melalui tiga kegiatan, sebagai berikut.

(1) Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat

Permasalahan sosial yang terjadi antara kelompok masyarakat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hakikat hidup dalam suatu masyarakat yang majemuk (*pluralistic*). Kurangnya pengetahuan dan pemahaman ini menimbulkan prasangka sosial antar kelompok masyarakat, dengan referensi kultur masing-masing. Terjadilah sentimen sosial yang kemudian mendorong antipati satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Untuk itu diperlukan upaya-upaya kemasyarakatan dalam rangka mengembangkan kapasitas masyarakat dalam bentuk kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelembagaan kultur dan sub kultur dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain. Dengan sosialisasi ini diharapkan akan terjadi proses belajar sosial antar kelompok masyarakat, untuk saling menerima perbedaan dan persamaan kultur pada kelompok masyarakat yang lain.

(2) Pendayagunaan sumber-sumber.

Dalam pekerjaan sosial dikenal beberapa jenis sumber, yaitu sumber informal, sumber formal dan sumber kemasyarakatan. Sumber-sumber ini dapat diperoleh di dalam kelompok masyarakat maupun dari kelompok masyarakat lain. Termasuk di dalam sumber-sumber tersebut adalah sistem

nilai, kaidah sosial, tradisi, lembaga sosial asli, organisasi sosial, dan institusi yang menyediakan pelayanan sosial dasar. Kegiatan yang dapat dilakukan terkait dengan pendayagunaan sumber ini antara lain: (1) pengembangan lembaga sosial asli yang ada di masyarakat sebagai mekanisme penyelesaian permasalahan antara kelompok masyarakat; (2) pengembangan jaringan kerja dari pemilik sumber seperti organisasi sosial/LSM, individu mampu, tokoh masyarakat, kelompok profesi dan lain-lain.

(3) *Pencegahan terjadinya permasalahan yang akan mengganggu pelaksanaan peranan dan tugas-tugas kehidupan kelompok masyarakat.*

Terjadinya permasalahan dapat dicegah apabila dalam masyarakat telah terjadi integrasi yang kuat antar kelompok-kelompok masyarakat. Integrasi ini melahirkan sistem nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan setia kawan. Meluasnya perasaan *empathy* antar kelompok masyarakat dan kepedulian untuk saling membantu satu sama lain.

Kultur yang berbeda antar kelompok masyarakat, tidak menjadikan perselisihan. Sebaliknya, perbedaan kultur pada masing-masing kelompok masyarakat menjadi sumber bagi pencegahan terjadinya permasalahan sosial. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah pengembangan mekanisme kerja lintas kelompok atau kultur, yang diarahkan untuk upaya pencegahan terjadinya permasalahan sosial antara kelompok masyarakat.

Dalam pekerjaan sosial dengan masyarakat dikembangkan model intervensi yang di dalamnya terdiri dari empat sistem, yaitu: *Pertama*, sistem

pelaksana perubahan atau stakeholder. Sistem pelaksana perubahan dalam upaya penguatan ketahanan sosial masyarakat adalah instansi pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program kesejahteraan rakyat. Penempatan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana perubahan, sesuai dengan kebijakan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan. *Kedua*, sistem klien. Sistem klien dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat adalah kelompok masyarakat di tingkat lokal (kabupaten/kota). Dalam pekerjaan sosial, sistem klien ini dapat diperluas atau dipersempit tergantung dari usaha perubahan yang akan dicapai. Terkait dengan penguatan ketahanan sosial masyarakat, klien dibedakan atas dasar kelompok masyarakat yang rentan konflik; dan kelompok masyarakat yang sedang mengalami konflik; *Ketiga*, sistem pelancar. Termasuk ke dalam sistem pelancar adalah kelompok, Orsos/LSM dan institusi yang dijadikan pelancar dalam proses penguatan ketahanan sosial masyarakat. Dengan menggunakan sistem pelancar ini, tujuan dari intervensi sosial akan tercapai secara optimal. Prinsip pemanfaatan sistem pelancar ini, apabila informasi dari sistem sasaran sangat terbatas. Penggunaan sistem pelancar ini berdasarkan asumsi bahwa permasalahan sosial dapat berasal dari individu maupun lingkungan sosialnya. Inilah yang menjadi dasar praktek pekerjaan sosial menggunakan pendekatan ganda (*dualistic approach*).

Keempat, sistem kegiatan. Termasuk ke dalam sistem kegiatan adalah kelompok profesi, Orsos/LSM, pergu-

ruan tinggi, individu yang memiliki komitmen dan kompeten serta dan institusi yang ada dalam masyarakat. Mereka melaksanakan kegiatan bersama-sama dengan sistem pelaksana perubahan dalam upaya penguatan ketahanan sosial masyarakat. Penggunaan sistem kegiatan ini didasarkan pada realitas, bahwa permasalahan sosial bersifat kompleks. Karena itu upaya penguatan ketahanan sosial masyarakat memerlukan keterpaduan dari berbagai disiplin, sektor, profesi dan pemilik sumber.

Dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat, ada berbagai peranan yang dapat dilaksanakan oleh sistem perubahan bersama-sama dengan sistem kegiatan dalam bentuk jaringan kerja, yaitu:

Advokasi

Peranan advokasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mewakili kepentingan kelompok masyarakat dari etnis manapun (azas keadilan) untuk memperoleh sumber yang dibutuhkan guna pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan dalam peranan advokasi adalah: (1) penyediaan informasi kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam upaya memperoleh sumber dan pelayanan bagi pemecahan masalah; (2) Pendekatan persuasif kepada kelompok-kelompok masyarakat agar mampu memanfaatkan sumber dan pelayanan yang tersedia dalam upaya pencegahan terjadinya masalah.

Mediasi

Peranan mediasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menyalurkan kepentingan kelompok masyarakat dengan pemilik sumber (organisasi/LSM, institusi

sosial). Kegiatan yang dilaksanakan dalam peranan mediasi adalah: (1) pengembangan sistem / jaringan informasi bagi kelompok masyarakat mengenai sumber-sumber yang dapat diakses dalam pemecahan masalah antara kelompok masyarakat; (2) penyelenggaraan kampanye sosial kepada kelompok-kelompok masyarakat secara intensif dan sinambung melalui berbagai media yang tersedia di tingkat lokal, dalam upaya meningkatkan dukungan kelompok masyarakat.

Pemberdayaan

Peranan pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pengertian, kesadaran, tanggung jawab, komitmen, partisipasi dan kemampuan semua pihak yang terkait dengan penguatan ketahanan sosial masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan dalam peranan pemberdayaan adalah: (1) pendekatan persuasif kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk dapat mengembangkan hubungan kolaborasi yang saling menghormati dan menguntungkan, baik ke dalam kelompok maupun bagi kepentingan masyarakat luas; (2) Penyelenggaraan kampanye sosial kepada kelompok-kelompok masyarakat secara intensif dan sinambung melalui berbagai media yang tersedia di tingkat lokal, dalam upaya meningkatkan dukungan kelompok masyarakat; (3) penguatan pranata sosial yang ada di masyarakat, sebagai wahana bagi pengembangan hubungan kolaboratif antar kelompok masyarakat.

Negosiasi

Peranan negosiasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjalin hubungan dengan semua pihak untuk mem-

peroleh dukungan dalam upaya penguatan ketahanan sosial masyarakat sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik antar kelompok. Kegiatan yang dilaksanakan dalam peranan negosiasi adalah: (1) penyelenggaraan pertemuan secara berkala yang diikuti oleh pemimpin kelompok masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya pencegahan maupun penanganan konflik antar kelompok masyarakat; (2) pengembangan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh kelompok masyarakat, dalam upaya mengurangi keresahan yang terjadi di masyarakat.

4. PENUTUP

Terjadinya konflik dengan kekerasan merupakan fenomena sosial yang perlu disikapi oleh semua pihak, karena akan berdampak terhadap ketahanan sosial masyarakat. Pada saat ini, di mana demokratisasi dan HAM menjadi isu global dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah Indonesia dihadapkan oleh permasalahan konflik dengan kekerasan antar kelompok masyarakat.

Untuk itu diperlukan kegiatan yang terencana dan sistematis, dengan mengedepankan peran serta dan keswadayaan masyarakat lokal. Dengan upaya ini, penanganan konflik dengan kekerasan antara kelompok masyarakat dapat diselesaikan dengan optimal dengan cara damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hanifah, et.al, *Penelitian Pola Penanganan Kesenjangan Sosial*, Puslitbang Kesejahteraan Sosial: Jakarta, 2001.
- _____, "Konflik Antar Etnis dan Alternatif Solusinya," *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* Vol.

- 6 Nomor 2, Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Jakarta, 2001.
- Direktorat Penanggulangan Korban Bencana, *Laporan Pelaksanaan Penanganan Pengungsi Tahap I*, Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial: Jakarta, 2001.
- Kompas, "Pemerintah Perlu Atur Kerukunan Antar-Etnis", 28 Februari, 2001.
- Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius : Yogyakarta, 1997.
- Mulia Astuti, "Pola Hubungan Antar Kelompok Etnis", Puslitbang Kesos, 2001.
- S. Budhisantoso, "Ketahanan Keluarga sebagai Basis bagi Pembinaan Kualitas SDM", *JURNAL* Nomor 40, Balitbang Kesejahteraan Sosial : Jakarta, 1994.
- Soetarso, *Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Masyarakat*, STKS: Bandung, 1991.
- Suradi, "Model Generalis dalam Praktek Pekerjaan Sosial : Intervensi Sosial Berpusat pada Masalah", *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* Vol. 6 Nomor 2, Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Jakarta, 2001.
- _____, "Lembaga Kesejahteraan Sosial Asli dan Peranannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial" : *Penelitian tentang Mamosad di Bolaang Mongondow Sulawesi Utara*, *JURNAL* Vol 5 Noimor 2, Puslitbang Kesejahteraan Sosial : Jakarta, 2000.
- _____, " Hak Asasi Manusia dan Pekerjaan Sosial", *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol 6 Nomor 1, Puslitbang Kesejahteraan Sosial : Jakarta, 2001.
- Paulus Tandilintin, " *Pembangunan Sosial : Respon Dinamis dan Komprehensif terhadap Situasi Krisis. Suatu Catatan bagi Sistem Ekonomi Kerakyatan* : Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP-Universitas Indonesia, Jakarta, April, 1999.
- United Nation, "Social Work and Human Right", 1994.